

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DI INDUSTRI PERTANIAN DALAM  
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI  
DI INDONESIA**

**Oleh Sidiq Permono Nugroho**

**(Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Manajemen dan Bisnis)**

**ABSTRAKSI**

Penguatan kelembagaan di Industri pertanian diharapkan akan mampu memberikan andil bagi peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, bila didukung oleh pemerintah, BULOG dan KUD. Penguatan kelembagaan BULOG (Badan Urusan Logistik) yang bertugas sebagai pengendali harga dengan mengoptimalkan perannya sebagai penampung hasil pertanian terutama padi dan KUD (Koperasi Unit desa) sebagai penyalur sarana pertanian bagi petani. Pemerintah berperan sebagai *supporting system* dalam mendukung penuh kedua lembaga tersebut dengan adanya kebijakan (regulasi) dan pendanaan. Dukungan dari ke tiga elemen tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Industri pertanian akan semakin maju dengan adanya potensi pendapatan yang meningkat. Investasi akan dengan sendirinya tercipta dan sumber daya akan dapat diserap untuk kegiatan industri pertanian. Trickle Down Effect dan Multiplier Effect akan tercipta karena angkatan kerja akan terserap dalam sector pertanian sehingga angka kemiskinan di sector pertanian akan berkurang. Import beras hanya melukai kerja keras para petani maka seharusnya pemerintah memberikan akses yang maksimal bagi petani sehingga kedepan Indonesia mampu mejaga ketahanan pangan tanpa bergantung dari import.

Kata Kunci : Penguatan kelembagaan, kepastian harga, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Petani, BULOG, KUD. Kemiskinan, Kesejahteraan petani.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan pertanian mencapai sekitar 107 juta hektar dari total luas daratan Indonesia sekitar 192 juta hektar. Namun luas lahan pertanian di Indonesia terus berkurang 27 ribu hektar per tahunnya. Ini sebagai dampak dari adanya alih fungsi untuk kawasan Industri, pemukiman dan sarana transportasi. Sehingga penurunan lahan pertanian berdampak pada penurunan jumlah hasil panen, kondisi ini tidak hanya terjadi pada produksi padi, tetapi juga pada komoditas lainnya seperti kedelai dan komoditas pertanian

lainnya. Pemerintah telah melaksanakan program RPPK (Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) yaitu program untuk menyediakan 15 juta hektar untuk lahan pertanian abadi. (*Republika*, 25/2/2008) yang diharapkan akan dapat meningkatkan produksi pertanian. Indonesia tidak akan lepas dari jati dirinya sebagai Negara agraris dengan sebagian besar masyarakatnya bekerja di sector pertanian dan yang lebih dilematis bahwa masyarakat yang bekerja di sector pertanian merupakan golongan penduduk dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini diakibatkan oleh lemahnya system tata kelola dari distribusi hasil pertanian, lemahnya lembaga yang seharusnya menjadi tumpuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani, pemerintah dalam hal ini seharusnya berperan dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil pertanian menjadi sangat penting karena merupakan kebutuhan dasar atau pokok dari masyarakat, sehingga harga pangan sangat berpengaruh dengan biaya hidup minimal dari masyarakat. Semakin rendah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Negara kita, posisi sektor pertanian sampai saat ini tetap merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dengan sumbangan terhadap pembentukan produksi nasional yang kurang dari 19%. Jika dimasukkan keseluruhan dari bentuk kegiatan yang dinyatakan sebagai sektor agribisnis juga hanya mencakup 47%, sehingga dominasi pembentukan nilai tambah juga sudah berkurang dibandingkan dengan sektor-sektor di luar pertanian. Isue peran pertanian sebagai penyedia pangan, bentuk ketahanan pangan juga menurun derajat kepentingannya (Dr. Noer Soetrisno --Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia) derajat kepentingan ini menurun karena adanya kebijakan impor yang seharusnya ditempatkan sebagai residual atau menutupi defisit kebutuhan beras dalam negeri. Tetapi kenyataannya, ketika musim panen raya tiba beras impor yang lebih murah membanjiri tanah air, sehingga harga gabah pun turun drastis. Mulai dari tahun 1984 sampai dengan 1993, Indonesia mengimpor rata-rata 160 ribu ton beras per tahun. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi rata-rata 1,10 juta ton per tahun pada periode 1994-1997. Pada masa krisis 1998-2000 meningkat lagi menjadi 4.65 juta per tahun. sepanjang 2001-2005 ada sedikit penurunan impor beras bertahan di atas 2 juta ton per tahunnya, yang membuat Indonesia praktis selalu berada pada lima besar negara pengimpor beras. (Supadi dalam M Ikhsan Modjo, *Kajian Monash Indonesian Islamic Student Westall*: 2006).

Penguatan kelembagaan akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi didaerah pertanian karena adanya potensi pendapatan yang meningkat dan kemudian akan memicu pemerataan

ekonomi di daerah pertanian. Sehingga sumber daya manusia dari daerah pertanian akan tetap fokus di dunia pertanian. Peningkatan kesejahteraan dimulai dari sektor yang dinamis dan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (spread effect) dan dampak ganda (multiplier effect) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Kekuatan pasar akan menjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusi spasial ekonomi dan proses trickle down effect dampak penetes kebawah dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di pedesaan tercapai. Kawasan pedesaan akan semakin kuat ketika ekonomi sudah terbangun karena hasil pertanian yang diupayakan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan. Implementasi dari penciptaan pusat pertumbuhan harus diikuti oleh trickle down effect (dampak penetes ke bawah) dan spread effect (dampak penyebaran) melalui aktivitas harmonis antara pusat pertumbuhan dengan basis sumberdaya di wilayah pedesaan, sehingga kegiatan pusat pertumbuhan berdampak pada daerah sekitarnya juga akan dapat tumbuh.

#### **TUJUAN**

1. Mengidentifikasi kelembagaan yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di industri pertanian
2. Pembentukan kelembagaan berdasarkan fungsi sehingga input dan output industri pertanian akan tertata dengan baik
3. Mendorong peran pemerintah yang lebih luas sebagai supporting system yang mampu membangun kekuatan ekonomi pedesaan.

#### **MANFAAT**

1. Mendorong kapasitas dan pemberdayaan masyarakat pedesaan agar mereka dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta modal sosial masyarakat pedesaan.
2. Mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan
3. Penguatan kelembagaan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian input dan output hasil pertanian.
4. Terwujudnya struktur kelembagaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Wilayah dan Pusat Pertumbuhan**

Wilayah secara konseptual didefinisikan sebagai ruang yang memiliki kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Undang – Undang nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang). Penafsiran yang sama diberikan Rustiadi, et al. (2006), bahwa wilayah merupakan unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Menyimak batasan tersebut, sesungguhnya wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis. Karakteristik wilayah mencakup komponen: biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap wilayah pada hakikatnya merupakan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Secara konseptual, pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yakni: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, beberapa strategi pembangunan yang diterapkan diantaranya adalah: strategi pertumbuhan ekonomi, strategi pertumbuhan dan kesempatan kerja, strategi pertumbuhan dan pemerataan, strategi yang menekankan pada kebutuhan dasar (basic need approach), strategi pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan strategi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

### **Pengertian Kelembagaan**

Beberapa pemikir ekonomi kelembagaan membangun definisi sendiri-sendiri tentang kelembagaan sesuai dengan konsentrasi yang digeluti oleh mereka. North (1996: 3) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia (humanly devised) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Pemikir lainnya Rutherford (1994), memaknai kelembagaan dalam pengertian yang hampir sama dengan North (1996), bahwa kelembagaan sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima

oleh anggota kelompok sosial , untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi sendiri maupun yang dimonitor oleh otoritas luar (external authority) (lihat Yustika, 2006: 40). Dari dua pengertian diatas dapat dilihat baik North (1996) maupun Rutherford (1994) sama-sama menekankan kata kunci aturan dan atau regulasi sebagai inti dari pengertian kelembagaan itu sendiri. Dalam pengertian yang lebih praktis menurut definisi Brinkerhoff and Goldsmith (1992) dan juga menurut World Bank (2002, institusi adalah aturan prosedur yang mempengaruhi bagaimana orang-orang berinteraksi, institusi juga adalah organisasi yang mengimplementasikan aturan untuk mencapai keinginan bersama dalam organisasi (lihat Arsyad, 2005:42). Peran institusi atau kelembagaan dalam dunia ekonomi dipandang sangat penting. Pandangan Neo klasik yang menanggap kelembagaan tidak begitu penting selama ini ternyata tidak terbukti. Pada kenyataannya kelembagaan sangat berperan dalam berjalannya proses ekonomi pasar yang ternyata banyak mengalami kegagalan terutama di negara berkembang. Dalam pandangan North (1996:6), peranan utama institusi ditekankan pada pengurangan ketidakpastian yang terjadi dalam masyarakat dengan cara menyelenggarakan suatu interaksi manusia yang stabil.

New Institutional Economic menekankan pada kendala yang menghalangi proses penciptaan/ pengkondisian kelembagaan dan utamanya memfokuskan kepada pentingnya kelembagaan sebagai kerangka interaksi antar individu (Yustika, 2006: 56). New Institutional Economic menggunakan pendekatan yang multidisiplin yang meliputi aspek ekonomi, hukum, teori organisasi, ilmu politik, sosiologi dan antropologi (Klein, 1999: 456). New Institutional Economics secara spesifik menurut Klein bertujuan untuk menjelaskan apa itu institusi, bagaimana institusi tersebut berkembang, apa tujuan institusi tersebut hadir, bagaimana institusi tersebut berubah dan diperbaiki (Klein, 1999:456). Lebih lanjut menurut Klein, New Institutional Economic adalah sebuah pendekatan yang interdisipliner yang merupakan perpaduan antara ekonomi, hukum, teori organisasi, teori politik, sosiologi dan antropologi untuk memahami kelembagaan social, politik dan kehidupan bisnis. Dalam pandangan New Institutional Economics aturan formal dan informal yang jelas, terbuka dan ditegakkan akan menghasilkan kepastian atau certainty. Dengan adanya kepastian ini, maka kinerja kelembagaan akan meningkat, Hal ini selanjutnya akan mendorong produktifitas kerja lembaga dan orang-orang dalam lembaga tersebut.

## Teori Basis Ekonomi

Inti dari teori ini adalah membedakan aktivitas sektor basis dengan aktivitas sektor non basis, dimana Sektor Basis yang ada pada suatu pusat pertumbuhan adalah sektor yang pertumbuhannya dapat menentukan pembangunan secara menyeluruh pada daerah tersebut. Sektor non basis adalah sektor sekunder dalam arti sektor tumbuh akibat dari pembangunan yang menyeluruh di wilayah. Teori basis ekonomi ini berupaya menentukan sektor basis dari sebuah wilayah, kemudian dari penentuan sektor tertentu diramalkan aktivitas sektor yang dapat digunakan untuk menganalisa dampak tambahan dari aktivitas sektor terkait. Basis ekonomi dari sebuah aktifitas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja dari suatu basis ekonomi sebuah daerah, dan semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sektor basis. Pendapatan dan kesempatan kerja sector basis sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekspor sektor basis tersebut. Hal ini mengakibatkan industri-industri yang berorientasi ekspor yang merupakan motor penggerak di wilayah pertumbuhan. Pendapatan dan kesempatan kerja non basis ditentukan oleh pendapatan dan kesempatan kerja sektor basis. Konsep kunci dari teori basis ekonomi ini adalah kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Oleh karena itu, tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa yang berasal dari luar daerah/negeri. Sektor basis diindikasikan oleh nilai *Location Quotient* ( $LQ > 1$ ). Sedangkan, Kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah perekonomian yang bersangkutan dan sektor-sektor non basis diindikasikan sebaliknya ( $LQ < 1$ ). Aktifitas basis berperan sebagai penggerak utama perekonomian suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain maka akan semakin maju pertumbuhan wilayah. Sektor basis berperan dalam pengembangan wilayah, karena potensi untuk meraih pendapatan yang besar dari ekspor. Nilai LQ juga mengindikasikan adanya pemusatan manfaat relatif, suatu sektor antar wilayah kabupaten, yang disebabkan oleh melimpahnya kekayaan sumberdaya alam yang bersifat *imperfect mobility*. Menurut Arief (1993), terdapat empat metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor kunci/basis dalam perekonomian, yakni:

- a. Suatu sektor dianggap kunci apabila, mempunyai kaitan kebelakang (*backward linkage*) dan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) yang relatif tinggi.
- b. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila, menghasilkan output bruto yang relative tinggi sehingga mampu mempertahankan *final demand* yang relatif tinggi pula.

- c. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila, mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi.
- d. Suatu sektor dianggap kunci apabila, mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang relative tinggi.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Industry pertanian merupakan sector yang sangat layak untuk dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas karena luas areal pertanian yang masih bisa untuk dikembangkan dan karena masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Dalam beberapa tahun kedepan krisis pangan akan mengancam kehidupan di bumi ini sehingga perlu adanya penanganan ekstra terhadap peningkatan hasil pertanian. Penguatan Kelembagaan di industry pertanian perlu ditata ulang dalam rangka untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dalam mengatasi kelangkaan pangan di masa yang akan datang. Peran penguatan kelembagaan akan lebih memberikan kemudahan dan untuk memperbaiki kesejahteraan para petani. Peran yang diharapkan adalah sebagai tangan panjang pemerintah dalam menampung hasil pertanian khususnya padi dan sebagai distributor atas input dan output dari produk pertanian sehingga secara optimal memberikan peningkatan pendapatan bagi para petani tanpa berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen.

Tata kelola yang baik dalam distribusi beras bertujuan untuk mencegah penumpukan pendapatan pada pihak tertentu sehingga diharapkan akan dapat menurunkan harga jual beras. Tata niaga ini penting karena petani akan mendapat kepastian dalam penetapan harga jual hasil panennya dan akan mencegah kenaikan harga jual yang melebihi kewajaran. Lembaga yang diharapkan mampu untuk mengatasi masalah tersebut adalah BULOG dilevel pemerintah dan KUD ditingkat petani. BULOG diharapkan akan mampu dalam pengaturan distribusi yang baik dan pengendalian harga secara menyeluruh dan KUD diharapkan berperan dalam distribusi sarana produksi pertanian seperti pupuk yang murah, bibit padi yang unggul dan tahan dalam segala cuaca serta penampung sementara dari hasil panen para petani di sekitarnya.

Akan tetapi selama ini peran kedua lembaga tersebut tidak memberikan fungsi yang maksimal bagi para petani. BULOG yang seharusnya bertugas dalam pembelian gabah hasil panen dari petani ternyata kurang dapat menjalankan fungsi idealnya. Selama ini, pemerintah melalui BULOG pada kenyataannya membeli gabah dan beras bukan dari petani tetapi dari

pedagang beras, yang terkonsentrasi di tangan beberapa distributor besar yang bertindak sebagai oligopolis pasar sehingga mereka akan dapat menentukan harga jual. Disisi lain karena BULOG tidak mampu menyerap hasil panen para petani dan keengganan untuk membeli langsung dari petani berdampak pada defisit APBN, kondisi ini lebih banyak jatuh bukan pada petani akan tetapi sekedar dinikmati segelintir pedagang besar. Dalam satu tulisan di Harian Republika (24/01/2006) Deputi Menko Perekonomian, Bayu Krisnamurthi, mengatakan BULOG hanya mampu menyerap sekitar 10 ton dari surplus yang dikabarkan mencapai 2,7 juta ton pada tahun 2005. Selebihnya ditahan oleh para pedagang untuk berbagai alasan. Dan pada kenyataannya BULOG sendiri menetapkan harga beli beras yang lebih rendah dari harga beli ditingkat pedagang besar sehingga para petani lebih memilih menjual hasil panen ke para pedagang besar, hal ini berdampak pada semakin kuat posisi pedagang besar sebagai oligopolis yang menentukan harga bersa. Seperti kita ketahui bersama para pedagang besar meraup keuntungan yang berlebih dari setiap kenaikan harga, ini berbanding terbalik dengan kondisi para petani yang selalu menjadi pihak yang menanggung resiko dari kegagalan.

Direktur Utama Induk KUD, Bambang Eko mencatat per tahun 2000 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Indonesia sebanyak 9.400 KUD tetapi banyak dari koperasi-koperasi tersebut yang "mati suri" karena berbagai faktor penyebab diantaranya permodalan dan akses pasar dalam menjual hasil pertanian. Saat ini KUD yang sudah terdata dan terkonsolidasi sebanyak 2.700 KUD tersebar di Jawa, Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi. KUD merupakan lembaga yang seharusnya mampu untuk menjadi patner bagi petani sebagai penampung sementara hasil pertanian dan kemudian untuk di jual kepada BULOG. Sebagai penyedia sarana produksi, KUD harus menjadi patner pemerintah dalam distribusi pupuk bersubsidi yang ditujukan bagi kelompok petani yang menjadi anggotanya. Penyediaan bibit padi unggul yang tahan hama dan tahan terhadap berbagai musim dan kondisi ekstrim sekalipun sudah mampu dihasilkan oleh Institut Pertanian Bogor hanya saja perlu menjalin kerjasama dalam pengadaannya.

## **PEMBAHASAN**

Penguatan kelembagaan baik BULOG dan KUD akan memberikan kepastian bagi petani dalam hal kemudahan input yang dibutuhkan petani dan output yang dihasilkan oleh petani. Penguatan kelembagaan akan meningkatkan pendapatan petani dan pada akhirnya akan



berdampak bagi terwujudnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat pedesaan. Potensi ekonomi terbangun dengan adanya kesejahteraan yang lebih baik. Peran pemerintah memberikan kepastian dalam regulasi akan membatasi ruang gerak oligopolis yang mempengaruhi pembentukan harga, pemenuhan kebutuhan pokok akan lebih ringan sehingga kelebihan pendapatan akan menciptakan permintaan kebutuhan lainnya. Sektor lain akan dapat tumbuh dengan adanya permintaan potensial yang tercipta karena adanya kenaikan pendapatan.

Peran Pemerintah dalam penguatan kelembagaan bagi industri pertanian adalah sebagai supporting system dalam mendukung penguatan kapasitas lembaga dengan memberikan kepastian regulasi dan pendanaan. Regulasi dari pemerintah di butuhkan untuk melindungi kepentingan petani dengan adanya kepastian dalam penetapan harga beli yang memberikan kesejahteraan bagi para petani dan pembatasan harga jual beras kepada konsumen akhir atau masyarakat. Pendanaan dibutuhkan bagi penguatan kapasitas BULOG sehingga mampu untuk menyerap sebagian besar hasil gabah dari petani sehingga pembentukan harga dapat dikontrol oleh pemerintah. Regulasi pemerintah tentang penyediaan sarana pertanian termasuk pupuk harus memberikan kemudahan bagi para petani. Kemudahan dalam pengadaan dan penyaluran akan mengikis para spekulan yang meraup keuntungan dari adanya kelangkaan pupuk tersebut. Pembentukan Kelompok tani yang diwadahi melalui KUD akan mempermudah mengidentifikasi kebutuhan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan serta hasil produksi pertanian.

## **KESIMPULAN**

Pertumbuhan ekonomi akan mampu ditingkatkan dengan memberikan kepastian dalam pembentukan harga sehingga akan memberikan keuntungan yang lebih memadai bagi petani. Potensi yang ada akan memberikan pengaruh pada peningkatan produksi pertanian. Penguatan kelembagaan erat kaitannya dengan peningkatan kemakmuran bagi masyarakat pedesaan. Peran kelembagaan mampu menjembatani antara kepentingan petani dengan pemerataan ekonomi. Lebih konkritnya kemudahan bagi petani berdampak pada pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Impor beras hanya akan membuat ketergantungan pada Negara lain dan dalam jangka panjang impor beras dari Negara lain akan semakin terbatas karena keterbatasan dari produksi Negara bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Bonnei Setiawan, 1997, Reformasi Agraria, Perubahan Politik, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria dan lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan *Republika*, 25/2/2008

North, Douglas C., 1995, The New Institutional Economics and Third World Development, Rontledge, London.

Dufhues, Thomas , dkk 2002 International Symposium, Sustaining Food Security and Managing Natural Resources in Southeast Asia – Challenges for the 21st Century in Chiang Mai, Thailand. Dalam,

[http://www.unihohenheim.de/i490a/dps/2001/dp4\\_01.pdf#search=%22NIE%20and%20%20policy%20microfinance%20institution%20filetype%3Apdf%22](http://www.unihohenheim.de/i490a/dps/2001/dp4_01.pdf#search=%22NIE%20and%20%20policy%20microfinance%20institution%20filetype%3Apdf%22)

Kherallah, Mylène and Kirsten, Johann, 2001 New Institutional Economics: Applications For Agricultural Policy The Research In Developing Countries, MSSD Discussion Paper NO. 41 International Food Policy Research Institute

Arsyad, Lincolin, 2005, An Assessment Of Performance And Sustainability Of Microfinance Institutions: A Case Study of Village Credit Institutions in Gianyar, Bali, Indonesia, Unpublished PhD Thesis, Adelaide, Australia: Flinders University

Babbie, Earl, 2004, The Practice of Social Research, Tomson Wadworth, United State of America

Bernstorff, Alexandra von, 2004, Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde durch den Promotionsausschuss Dr. rer. pol. der Universität Bremen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Dalam

[http://elib.suub.unibremen.de/publications/dissertations/EDiss1259\\_Bernstorff.pdf#search=%22information%20asymmetry%20and%20NIE%20in%20microfinance%22](http://elib.suub.unibremen.de/publications/dissertations/EDiss1259_Bernstorff.pdf#search=%22information%20asymmetry%20and%20NIE%20in%20microfinance%22)

Undang – Undang No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Yustika, Ahmad Erani, 2006, Ekonomi Kelembagaan, Defenisi, Teori dan Strategi, Bayumedia, Malang.

<http://antaranews.com/berita/1285828783/menkop-prioritaskan-revitalisasi-kud-pada-2011>

Klein, Peter G, New Institutional Economics, 1999 dalam

<http://www.ccc.zju.edu.cn/~yao/uploadfile/papers/p007pdf#search=%22new%20instiutional%20economic%20journal%22>

Supadi dalam M Ikhsan Modjo, Kajian Monash Indonesian Islamic Student Westall: 2006

Dr. Noer Soetrisno, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Deputi Menko Perekonomian, Bayu Krisnamurthi Harian Republika (24/01/2006)